

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN
EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI DENGAN STANDAR
BIAYA SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Sigit Pramono, Eman Sulaiman, Herman Masyhud
Program Studi Magister Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon

Correspondence		
Email: Sigitpramono188@Gmail.Com	Tlp : 085640446104	
Submitted: 29 July 2024	Accepted: 5 August 2024	Published: 6 August 2024

ABSTRAK

Fenomena terkini menunjukkan bagi organisasi sektor publik untuk meningkatkan kinerja mereka semakin mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak perencanaan dan evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dengan memasukkan standar biaya sebagai variabel moderasi. Variabel yang diteliti meliputi perencanaan dan evaluasi anggaran sebagai variabel independen, kinerja organisasi sebagai variabel dependen, serta standar biaya sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Teknik sampling yang diterapkan adalah purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 54 orang. Analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Sementara itu, pengujian regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak mengindikasikan bahwa standar biaya memiliki pengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran dan kinerja organisasi, tetapi tidak mempengaruhi hubungan antara evaluasi anggaran dan kinerja organisasi.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Evaluasi Anggaran, Standar Biaya dan Kinerja Organisasi.

Pendahuluan

Sebuah organisasi, baik publik maupun swasta, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana yang mencakup program-program diperlukan yang dituangkan dalam anggaran. Anggaran merupakan estimasi mengenai tindakan-tindakan organisasi di masa mendatang, dan berfungsi sebagai alat pelaksanaan strategi organisasi. Oleh karena itu, anggaran harus disiapkan dengan cermat untuk menghindari bias dan penyimpangan.

Anggaran adalah rencana tertulis tentang tindakan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk jangka waktu tertentu. Sebagai alat manajemen, anggaran sangat berguna bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengendalikan organisasi demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Nafarin, 2000).

Reformasi penganggaran di Indonesia, yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menetapkan bahwa anggaran pemerintah harus disusun dengan pendekatan kinerja, yang menekankan efisiensi dan efektivitas rencana kerja dan anggaran. Namun, implementasi anggaran kinerja belum sepenuhnya memadai. Salah satu buktinya adalah bahwa anggaran dibelanjakan secara tidak efektif dan terkonsentrasi pada akhir tahun, yang mengakibatkan penundaan manfaat bagi masyarakat.

Rencana kerja yang terarah dan menyeluruh diperlukan agar manajemen dapat mengendalikan kegiatan operasional untuk mencapai kinerja organisasi yang baik. Kinerja anggota organisasi di semua tingkat mencerminkan kinerja organisasi. Konsep kinerja pemerintah daerah

muncul ketika lembaga pemerintahan mempromosikan pemerintahan yang baik. Organisasi yang sukses memiliki visi dan misi yang jelas dan dapat diukur, yang ditunjukkan dalam kinerjanya (Anggraeni, 2009).

Anggaran dibuat dengan target yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan organisasi, dengan interval waktu dan format yang berbeda (Salbiah dan Rizky, 2012). Penyusunan anggaran adalah tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dapat menggagalkan program yang telah direncanakan. Anggaran seringkali tampak terpisah dari perumusan dan perencanaan strategis. Akibatnya, implementasi anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan inisiatif dan tujuan organisasi.

Setiap daerah sering menghadapi masalah penganggaran selama proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan anggaran. Pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, penyerapan anggaran belum optimal, terdapat revisi-revisi, dan kesalahan dalam menentukan jenis belanja. Kesalahan-kesalahan ini mengakibatkan pergeseran/perubahan anggaran yang memerlukan waktu, menyebabkan keterlambatan dan penyerapan anggaran yang tidak maksimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana perencanaan anggaran, evaluasi anggaran, dan standar biaya berkorelasi dengan peningkatan kinerja organisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Organisasi dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah”.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Organisasi

Kinerja (performance) adalah konsep populer dalam manajemen publik dilihat dari dua perspektif: kinerja karyawan secara pribadi dan organisasi. Kinerja organisasi mencerminkan tingkat pencapaian pelaksanaan tugas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi. Kinerja organisasi, menurut Surjadi (2009:7), adalah totalitas hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi, yang dapat diukur dari tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sobandi (2006:176), kinerja organisasi adalah apa yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, termasuk input, output, hasil, keuntungan, dan dampak. Kinerja organisasi secara keseluruhan mengacu pada seberapa baik organisasi dapat memenuhi kebutuhan setiap kelompok terkait dan terus meningkatkan kemampuan untuk mencapainya (Edward Elgar Publishing, 2020). Untuk meningkatkan kinerja organisasi, diperlukan penetapan tujuan yang jelas, perencanaan efektif, pemantauan indikator kinerja utama (IKU), inisiatif perbaikan berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Mengevaluasi dan mengelola kinerja organisasi sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah bagian dari perencanaan strategis yang menggunakan sistem anggaran kinerja dan dimulai dengan perencanaan kinerja. Ini adalah proses yang melibatkan menciptakan masalah strategis, yang kemudian diubah menjadi program dan kegiatan yang relevan. Saat membuat perencanaan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan rencana tahunan

pemerintah daerah. Perencanaan anggaran merupakan langkah awal yang penting dalam kegiatan pemerintah untuk memastikan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam sistem penganggaran, semua kegiatan dimulai dari rencana pembangunan jangka menengah yang kemudian dirinci dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Anggaran itu sendiri merupakan estimasi kinerja finansial yang hendak dicapai dalam periode tertentu, sedangkan penganggaran adalah proses mengalokasikan sumber daya keuangan terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang biasanya tidak terbatas.

Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran adalah proses menilai dan menganalisis kinerja pelaksanaan anggaran untuk menentukan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Menurut Khalid Rashid (1994), evaluasi anggaran melibatkan pengukuran dan perbandingan realisasi anggaran dengan rencana, identifikasi penyimpangan dari rencana, analisis penyebab penyimpangan, penilaian kinerja unit terkait, dan rekomendasi perbaikan untuk masa depan. Proses ini mencakup evaluasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kinerja program/kegiatan menggunakan metode seperti analisis varians, rasio keuangan, audit kinerja, dan survei kepuasan. Evaluasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kinerja penganggaran, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Klasifikasi dan dimensi evaluasi anggaran memainkan peran penting dalam proses ini. Klasifikasi dapat dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan, objek evaluasi, ruang lingkup, pelaksana, metode, dan tujuan evaluasi. Dimensi evaluasi meliputi aspek keuangan, kinerja, manajemen, waktu, sumber daya, dan dampak, dengan indikator yang spesifik untuk setiap dimensi guna mengukur pencapaian dan efisiensi anggaran. Evaluasi yang komprehensif dan terstruktur membantu organisasi dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan tujuan organisasi tercapai.

Standar Biaya

Standar biaya adalah elemen penting dalam sistem anggaran kinerja, berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan bersama dengan Analisis Standar Belanja (ASB) dan indikator kinerja. Standar biaya merujuk pada harga satuan barang atau jasa yang berlaku di masing-masing daerah, dan penetapannya memudahkan penyusunan anggaran belanja program atau kegiatan. Pengembangan standar biaya perlu dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali, untuk mencerminkan perubahan harga di daerah tersebut. Ini membantu memastikan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan yang sama di berbagai satuan kerja tidak berbeda-beda, serta mendukung penganggaran dengan pendekatan kinerja yang melibatkan pengukuran dari output hingga dampak.

Standar biaya terdiri dari dua jenis: Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK). SBU adalah biaya satuan tertinggi yang berlaku lintas kementerian, lembaga, atau wilayah, yang membantu menentukan batasan alokasi sumber daya dan memastikan efisiensi serta efektivitas belanja. SBK, sebaliknya, digunakan untuk kegiatan khusus di kementerian atau wilayah tertentu. Untuk menyusun SBK dengan baik, perlu ada Petunjuk Teknis Penyusunan SBK yang berisi pedoman tentang tata cara penyusunan, pengajuan, dan penelaahan SBK. Penyempurnaan petunjuk ini bertujuan untuk mempermudah penyusunan anggaran berbasis kinerja dan mendukung pencapaian efisiensi serta efektivitas penganggaran.

Teori Agency

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan hubungan antara dua pihak: prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen). Prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen, yang diharapkan bertindak atas nama prinsipal. Keduanya dianggap sebagai aktor rasional yang termotivasi oleh kepentingan pribadi. Masalah utama teori ini terletak pada ketidakmampuan mereka untuk sepenuhnya memahami atau memisahkan kepentingan dan informasi yang berbeda. Dalam konteks akuntansi manajemen, teori ini digunakan untuk merancang kontrak kerja dan sistem informasi yang memaksimalkan manfaat bagi prinsipal dan mengatasi kendala perilaku dari agen.

Dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia, teori keagenan dapat diterapkan pada proses penyusunan anggaran daerah, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini melibatkan eksekutif dan legislatif, di mana eksekutif menyusun rancangan APBD berdasarkan kesepakatan arah kebijakan dan prioritas anggaran yang ditetapkan bersama legislatif. Legislatif bertindak sebagai prinsipal yang mengawasi eksekutif sebagai agen dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini, eksekutif harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada legislatif, yang berperan sebagai pengawas sesuai dengan prinsip-prinsip keagenan.

Goal Setting Theory

Teori penetapan tujuan (goal setting theory), yang dikemukakan oleh Locke (1968), menjelaskan hubungan erat antara penetapan tujuan dan kinerja individu. Locke menunjukkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua elemen utama: *content* (nilai-nilai) dan *intentions* (tujuan). Tujuan yang telah ditetapkan untuk masa depan akan mempengaruhi perilaku dan tindakan yang dilakukan saat ini. Manajer menganggap penetapan tujuan sebagai alat penting untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja, di mana teori ini menekankan bahwa hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja sangat signifikan.

Locke juga menemukan bahwa penetapan tujuan berpengaruh pada ketepatan anggaran. Organisasi yang menetapkan sasaran dalam bentuk rencana anggaran lebih cenderung mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misinya. Anggaran tidak hanya mencakup rencana dan jumlah nominal untuk kegiatan, tetapi juga sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan teori ini, keberhasilan pegawai dalam mengelola anggaran berhubungan langsung dengan kinerja organisasi. Faktor-faktor seperti perencanaan anggaran, evaluasi anggaran, dan standar biaya menjadi penentu utama, di mana semakin tinggi kualitas faktor-faktor ini, semakin besar kemungkinan pencapaian tujuan organisasi.

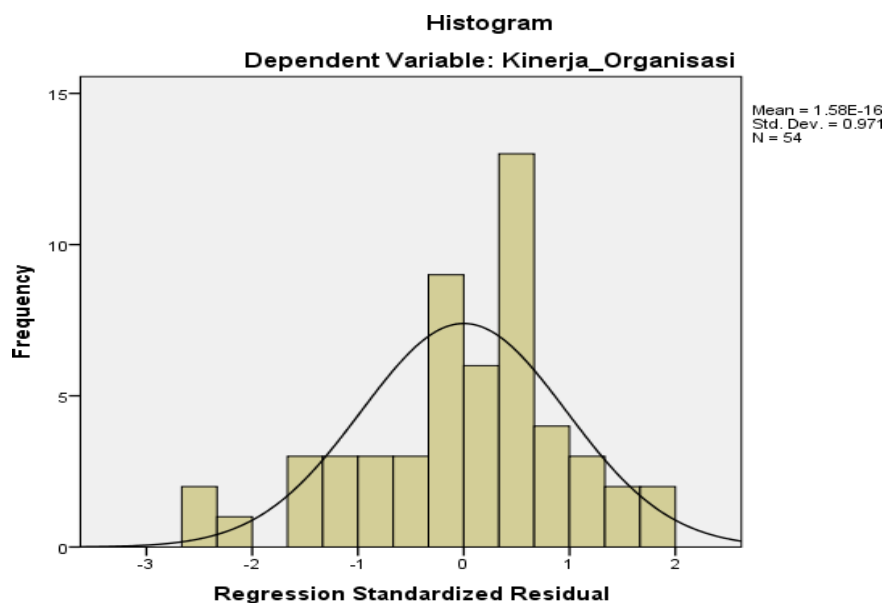
METODE PENELITIAN

Menurut Surgiyono (2012:5), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data valid yang dapat diuji, dibuktikan, dan dikembangkan sebagai dasar pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengantisipasi masalah. Dalam konteks ini, penulis tertarik menggunakan penelitian kuantitatif, yang juga dikenal sebagai metode tradisional, positivis, scientific, confirmatory, atau kuantitatif. Penelitian ini bersifat deduktif dan bertujuan untuk menguji hipotesis, bukan merumuskan hipotesis. Penelitian kuantitatif umumnya digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode kuantitatif diterapkan karena masalah yang dihadapi jelas, yakni perbedaan antara teori dan praktik atau antara rencana dan pelaksanaan yang seharusnya tidak terjadi. Masalah ini berupa kesenjangan antara harapan dan realitas, yang menimbulkan rumusan masalah. Rumusan masalah ini merujuk pada pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data dan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode deskriptif, asosiatif, dan verifikatif. Metode deskriptif bertujuan untuk memahami gambaran sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode verifikatif digunakan untuk menguji jawaban masalah berdasarkan hasil penelitian yang bersifat sementara, dengan menganalisis hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), serta hubungan kausal yang menunjukkan hubungan sebab-akibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa distribusi normal nilai residual, yang dalam penelitian ini dilakukan menggunakan grafik histogram dan grafik normal probability plot. Hasil uji menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal, seperti yang terlihat dari bentuk grafik histogram yang simetris dan tidak melenceng ke kanan atau kiri.



Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan standar biaya sebagai variabel moderasi, pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, perencanaan anggaran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Hasil uji menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi, sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berdampak positif terhadap kinerja. Penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya oleh Asmarani (2013) yang menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran berkontribusi terhadap kinerja Kepala SKPD. Dengan perencanaan yang

efektif, seperti yang diuraikan dalam teori penetapan tujuan oleh Locke (1968), organisasi dapat lebih mudah mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misinya.

Kedua, evaluasi anggaran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji t. Hipotesis kedua ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan evaluasi anggaran dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Risky dan Salbiah (2012) yang menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Evaluasi anggaran yang tepat membantu mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan, serta memfasilitasi perbaikan kinerja di periode berikutnya. Dengan adanya evaluasi anggaran, pemerintah dapat menilai pelaksanaan anggaran dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa depan.

Ketiga, mengenai pengaruh standar biaya dalam memoderasi perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar biaya berpengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi perencanaan anggaran. Ini berarti bahwa standar biaya dapat memperlemah pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi, berlawanan dengan harapan awal. Penelitian ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan terkait standar biaya, yang dapat mengurangi efektivitas perencanaan anggaran. Hal ini juga berdampak pada kinerja organisasi, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, di mana standar biaya yang tidak dipatuhi dapat mengakibatkan penurunan kinerja. Hasil ini menyimpang dari teori agensi dan teori penetapan tujuan, yang mengharapkan standar biaya memperkuat perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran dalam meningkatkan kinerja.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana dua variabel independen perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran mempengaruhi variabel dependen, yaitu kinerja organisasi, serta bagaimana variabel moderasi standar biaya berinteraksi dengan variabel dependen.

Perencanaan anggaran memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar pada kinerja organisasi, menurut data yang dikumpulkan dan analisis regresi berganda yang dilakukan. Kinerja organisasi dan perencanaan anggaran berkorelasi langsung; semakin besar tingkat perencanaan anggaran organisasi, semakin tinggi kinerjanya dalam domain tersebut. Kinerja organisasi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penilaian anggaran. Kinerja organisasi dan evaluasi anggaran berkorelasi langsung; semakin besar aktivitas evaluasi anggaran organisasi, semakin tinggi kinerjanya.

Selain itu, ditemukan bahwa interaksi antara standar biaya dan perencanaan anggaran memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, yang menunjukkan bahwa standar biaya merupakan variabel moderasi dalam hubungan antara perencanaan anggaran dan kinerja organisasi. Hal ini ditentukan berdasarkan data yang dikumpulkan dan uji perbedaan absolut untuk melihat kemampuan standar biaya dalam memoderasi perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi. Selain itu, hubungan antara evaluasi anggaran dan kinerja organisasi tidak terpengaruh oleh interaksi antara standar biaya dan penilaian anggaran, yang menunjukkan bahwa standar biaya tidak beroperasi sebagai faktor moderasi dalam hubungan ini.

REFERENSI

- Abe, A. (2005). Perencanaan pembangunan. PT. Gunung Agung.
- Anggraeni. (2009). Pen Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi ketiga). Erlangga.
- Basri, R. (2013). Analisis penyusunan anggaran dan laporan evaluasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2651>
- Fadilah, S. (2009). Activity based costing (ABC) sebagai pendekatan baru untuk menghitung analisis standar belanja (ASB) dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2(1).
- Garrison, R. H., & Noreen, E. W. (2000). Akuntansi manajerial. Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2006). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS (Edisi ke-4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2009). Ekonometrika: Teori, konsep dan aplikasi dengan SPSS 17. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 update PLS regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2003). Ekonometri dasar (Terjemahan oleh Sumarno Zain). Erlangga.
- Kementerian Negara Departemen Keuangan. (n.d.). Kerangka acuan kerja penyusunan standar biaya.
- Latif, M., dkk. (2014). Perencanaan anggaran belanja bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Wacana*, 17(2), 78-87.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting and task performance. Prentice-Hall.
- Maharani. (2005). Analisis kinerja keuangan kantor Dinas Pendapatan Kota Batu. *Academia.edu*.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi Yogyakarta.
- Muhammad Iqbal, Rachman, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 18-34.
- Noviawati, I. (2014). Pengaruh locus of control, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap senjangan anggaran. <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/7640>
- PMK No. 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- PMK Nomor 115/PMK.02/2015 – Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Raharjo, E. (2007). Teori agency dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2.
- Salbiah, R. R. (2012). Pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal. Universitas Sumatera Utara*, 15(2).

Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Titi Mugiati. (2018). Pengaruh anggaran dan realisasi terhadap kinerja keuangan daerah (suatu studi pada Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi) (Tesis). Bandung.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.